



ULP DINILAI TAK DUKUNG PROGRAM PLT GUBRI

Realisasi APBD

Baru 36,4%

PEKANBARU (HR)-Hingga awal November ini, realisasi APBD Riau tahun 2014 baru mencapai 36,4 persen. Dengan kondisi yang ada saat ini, diperkirakan realisasi anggaran tidak akan mencapai 80 persen, seperti yang sempat ditargetkan Pemprov Riau beberapa waktu lalu.

NURMADI & HENDRA SAPUTRA

Liputan Pekanbaru

Berdasarkan kondisi ini, Pemprov Riau hanya berani mematok target serapan APBD hingga akhir tahun sebesar 70 persen.

Masih rendahnya serapan APBD Riau tahun 2014 tersebut, diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, M Yafiz, usai mengadakan rapat bersama Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman serta seluruh satuan

...Realisasi Hal 7



Realisasi...

Dari Hal. 1

KERJA perangkat daerah (SKPD), Senin (3/11) di Kantor Gubernur Riau.

Ia mengakui hingga awal November ini serapan APBD Riau 2014 masih rendah. Hingga akhir tahun nanti, diharapkan serapannya mencapai minimal 64 persen dari total pagu Rp8,84 triliun.

"Dari hasil realisasi seluruh SKPD hingga Oktober mencapai 34,6 persen. Kalau menurut angka sementara dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, red) diperkirakan baru bisa mencapai 64 persen lebih sampai akhir tahun. Itu baru perkiraan," terang Yafiz.

Dijelaskan Yafiz, dengan sisa waktu yang begitu singkat, target tersebut dinilai yang paling realistis. Setidaknya, dalam dua bulan ini, target sebesar 30 persen bisa tercapai.

Namun demikian, tambahnya, tidak tertutup kemungkinan serapan APBD bisa bertambah dari target tersebut. Hal itu jika seluruh SKPD mampu memaksimalkan realisasi anggaran dan menata kembali ketentuan tentang pencairan anggaran. "SKPD yang memungkinkan mempercepat pencairan sampai 30 Desember akan terus dimintai progresnya, untuk mempercepat realisasi," ungkapnya.

Satpol PP Tertinggi

Sejauh ini, Satpol PP Riau tercatat sebagai satker di lingkungan Pemprov Riau, yang tertinggi serapannya. Yakni 70,61 persen APBD dari total dana Rp53,9 miliar yang dianggarkan untuk satuan itu. Sementara itu, tiga satker lain diketahui seba-

gai yang paling rendah serapannya. Ketiga satker itu adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Dinas Peternakan dan Pertanian. Namun Yafiz enggan merincikan seberapa besar serapan ketiga satker tersebut.

Sementara itu untuk Silfa, diperkitakan akan mencapai Rp2 triliun lebih, mengingat serapan yang minim. Namun Silpa tersebut akan digunakan pada tahun 2015. "Jika serapan sampai 65-70 persen, maka sisa lebih penggunaan anggaran, kita lebih kurang Rp2,6 triliun dari Rp8,84 triliun. Setidaknya sampai Oktober baru Rp3 triliun anggaran yang terpakai dari anggaran yang ada," ujarnya lagi.

Tak Dukung Dukung Program Plt Gubri

Sementara itu, Unit Layanan Pengadaan pada LPSE Provinsi Riau, dinilai tidak mendukung program Plt Gubri untuk mempercepat serapan APBD Riau tahun 2014. Hingga kini, sejumlah proses pengadaan masih saja tidak sesuai jadwal.

Dari penelusuran pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Riau, beberapa proyek pengadaan tidak sesuai jadwal dan mengalami beberapa kali perubahan.

Di antaranya, Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Perkotaan (Pekanbaru 2) Rp4,02 miliar, Dinas Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Riau. Harusnya tanggal 30 Oktober sudah penandatanganan kontrak, namun hingga Senin (3/11), pemenang belum diumumkan.

Sebelumnya, Peningka-

tan Jalan Taluk Kuantan-Cerenti sebesar Rp19,7 miliar pada Dinas Bina Marga Riau juga beberapa kali mengalami perubahan. Di antaranya evaluasi penawaran 6 kali perubahan jadwal, evaluasi dokumen kualifikasi 7 kali perubahan, pembuktian kualifikasi 5 kali perubahan, upload berita acara hasil pelelangan 5 kali perubahan, penetapan pemenang 5 kali perubahan, pengumuman pemenang 5 kali perubahan, masa sanggahan 4 kali perubahan, surat penunjukan penyedia barang/jasa 4 kali perubahan, penandatanganan kontrak 4 kali perubahan.

Begitu pula untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Komputer pada kegiatan Pengembangan Pelayanan Multi Media dan Digital sebesar Rp6,58 miliar, pada Badan Perpustakaan dan Arsip. Program ini juga mengalami beberapa kali perubahan jadwal. Mulai dari pembukaan dokumen penawaran 6 kali, evaluasi dokumen kualifikasi 5 kali, pembuktian kualifikasi 2 kali, upload Berita Acara Hasil Pelelangan 2 kali, penetapan pemenang 2 kali dan pengumuman pemenang 2 kali.

Program lain yang juga mengalami perubahan antara lain, pengadaan peralatan kesehatan medis dan non Medis Pelayanan Bedah Sentral (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi) senilai Rp8,9 miliar.

Selanjutnya pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan in-

tensive (Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Umum) Rp3,76 miliar, pengadaan Laboratorium Pertanian Fakultas Pertanian UIR, pada Dinas Pendidikan Riau sebesar Rp4,09 miliar, serta kegiatan lainnya.

Terkait hal ini, Kepala Unit Pengadaan Lelang (ULP) LPSE Riau, yang juga Kepala Biro Pembangunan Indra, ketika dikonfirmasi wartawan melalui selulernya, tidak bersedia menjawab.

Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Asosiasi Kontraktor Konstruksi Seluruh Indonesia, Syakirman, menilai, kondisi itu menunjukkan panitia pengadaan tidak profesional, karena seharusnya tidak ada perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan.

"Saya sangat menyayangkan hal ini. Masyarakat melalui media massa sudah tahu bahwa Plt Gubernur Riau saat ini meminta agar SKPD yang ada menggesa realisasi pelaksanaan kegiatan. Bagaimana SKPD mau melaksanakan kegiatannya kalau pada proses pengadaan di LPSE saja tidak sesuai jadwal dan diundur-undur. Saya melihat Ketua ULP dan jajarannya di LPSE Riau tidak mendukung program Plt Gubernur. Karena itu sebaiknya pejabat yang ada di ULP dan jajarannya dievaluasi oleh Gubri," ujarnya.

Selain itu, Syakirman menduga, banyaknya perubahan jadwal itu untuk mengkondisi pemenang. Karena itu, ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi jeli melihat hal ini.***